

## ABSTRAK

Layanan internet prabayar menimbulkan persoalan hukum terkait status nilai kuota internet yang tidak terpakai dan hangus setelah masa aktif berakhir. Permasalahan ini muncul karena Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tidak mengatur secara tegas mekanisme pelaporan nilai sisa kuota sebagai bagian dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi, padahal pendapatan kotor menjadi dasar perhitungan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal yang merupakan hak negara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif menggunakan metode berpikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kuota internet prabayar yang tidak terpakai secara yuridis termasuk dalam kategori pendapatan kotor karena berasal dari kegiatan usaha telekomunikasi yang sah dan telah menjadi bagian dari kekayaan operator sejak pembayaran diterima. Oleh karena itu, nilai tersebut seharusnya menjadi dasar perhitungan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kewajiban Pelayanan Universal. Tidak dilaporkannya nilai kuota tidak terpakai dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi operator seluler, baik secara administratif, perdata, maupun pidana apabila terbukti mengurangi hak negara atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.

**Kata Kunci:** kuota internet tidak terpakai, pendapatan kotor, operator seluler, pertanggungjawaban hukum.

## **ABSTRACT**

*Prepaid internet services give rise to legal issues concerning the status of unused internet quota that expires upon the end of its validity period. This issue emerges due to the absence of explicit provisions in the Minister of Communication and Informatics Regulation Number 5 of 2021 governing the reporting mechanism for the residual value of unused quota as part of the Gross Revenue from Telecommunications Operations. This regulatory gap is significant because gross revenue serves as the basis for calculating Telecommunications Operation Fees and Universal Service Obligation Contributions, which constitute state entitlements.*

*This study employs normative legal research using a statutory approach. The research utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed prescriptively through a deductive method of reasoning.*

*The findings reveal that the value of unused prepaid internet quota legally falls within the category of gross revenue, as it originates from lawful telecommunications business activities and becomes part of the operator's assets upon receipt of payment from consumers. Accordingly, such value should be included as the basis for calculating Telecommunications Operation Fees and Universal Service Obligation Contributions. The failure to report the value of unused quota may give rise to legal liability for cellular operators, including administrative, civil, and criminal liability, where such omission is proven to have reduced the State's entitlement to Non-Tax State Revenue.*

**Keywords:** *unused internet quota, gross revenue, cellular operators, legal liability.*